

Mamuju Usulkan 2.323 Guru Non-PNS untuk Diangkat Jadi PPPK



Sumber foto:

https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive/fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1615981835/vavau23oinexpt0xfuwo.jpg

Kumparan.com -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, Sulawesi Barat, mengusulkan 2.323 guru non-PNS untuk penerimaan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Kepala Bidang Pengangkatan, Pemberhentian, Data, dan Informasi Pegawai BKD Mamuju, Muhammad Yusuf, menuturkan penerimaan formasi guru PPPK merupakan program Kemendikbud untuk pengangkatan satu juta guru.

"Mamuju diberi kesempatan mengusulkan pengangkatan P3K, kami kemarin usulkan di tahun 2020 itu sebanyak 2.323 guru itu akan diangkat secara bertahap sesuai jadwal yang diedarkan BKN bekerjasama dengan Mendikbud," kata Yusuf, Rabu (17/3).

Dia menambahkan, proses pendaftaran PPPK dilaksanakan pada Mei hingga Juni 2021. Sedangkan seleksi tahap pertama di bulan Agustus, seleksi tahap kedua Oktober, dan seleksi tahap ketiga Desember 2021. Sebanyak 2.323 guru yang diusulkan itu meliputi guru PAUD/TK, SD, dan SMP di Kabupaten Mamuju. "Berkenaan dengan guru agama PAI (Pendidikan Agama Islam), itu dikelola khusus oleh Departemen Agama (Depag)," ujarnya.

Yusuf menjelaskan, sebanyak 2.323 tenaga kontrak yang diajukan itu akan diangkat secara bertahap dengan perjanjian kontrak 5 tahun kerja. "Inshaallah, secara teknis kami menunggu regulasi dari pemerintah pusat, utamanya BKN karena kami sebagai BKPP Kabupaten Mamuju sebagai pelaksana ada bocoran bahwa pelaksanaan tes P3K itu modelnya seperti penerimaan CPNS," ucap Yusuf. "Cuma model sedikit dan diringankan karena memang pengangkatan diprioritaskan guru-guru tenaga kontrak yang sudah mengabdikan minimal dua tahun dan pendidikan profesi guru," sambungnya.

Adapun sistem penggajian PPPK ini nantinya menggunakan dana dari APBN dan setara dengan ASN. Sedangkan tunjangan profesi sumber pembayarannya dari APBD yang diatur dalam Perpres 1998 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

Sumber:

kumparan.com, *Mamuju Usulkan 2.323 Guru Non-PNS untuk Diangkat Jadi PPPK*, Rabu, 17 Maret 2021.

<https://kumparan.com/sulbarkini/mamuju-usulkan-2-323-guru-non-pns-untuk-diangkat-jadi-pppk-1vNDCE9ilea/full>

Catatan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 angka 4

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pasal 22

PPPK berhak memperoleh:

- a. Gaji dan tunjangan;*
- b. cuti;*
- c. perlindungan; dan*
- d. pengembangan kompetensi.*

Pasal 101

- (1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK.*
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggungjawab jabatan, dan resiko pekerjaan.*
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah.*
- (4) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*